

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pesantren

Menurut Zamakhsyari Dhofier berdirinya pesantren sejak abada ke-16 Masehi dengan ditandai maraknya pengajaran berbagai kitab klasik bercorak teologi dan tasawuf. Ditinjau dari segi historisnya, pondok pesantren merupakan Lembaga Pendidikan yang tumbuh serta berkembang ditengah-tengah masyarakat. Eksistensi Lembaga Pendidikan tersebut telah sejak lama mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Tentunya ikut terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya dari segi moral dan moril, namun juga telah ikut serta memberikan sumbangsih yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan Pendidikan. Istilah pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan *pe* dan akhiran *an* yang berarti tempat tinggal para santri. Menurut Profesor Johns (dalam Dhofier 2011:41) istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Sedangkan menurut C.C. Berg istilah tersebut berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu akan buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku mengenai ilmu pengetahuan. Secara keseluruhan ciri-ciri umum pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang asli Indonesia, yang hingga saat ini merupakan warisan dari kekayaan bangsa Indonesia yang terus berkembang sampai sekarang. Maka dari itu awal mula keberadaan sebuah pondok pesantren, tidak jauh dari kewajiban “berdakwah Islamiyah” yakni kewajiban

untuk setiap umat agar menyebarkan agama Islam di Indonesia, serta pecalannya untuk menciptakan kader-kader mubaligh.

Secara terminologi pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki sistem asrama atau pondok, dimana kyai sebagai figur sentral, serta mesjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwai, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan seorang kyai yang kemudian diikuti oleh santri sebagai kegiatan utamanya (Amir Hamzah dalam Mahdi, 2013:4).

Seperti yang dijelaskan oleh Mastuhu dalam (Mas'ud dkk, 2002:86) bahwasannya pesantren merupakan bagian dari lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.

Jika dibandingkan dengan sistem Pendidikan yang telah ada di Indonesia saat ini, pesantren jauh lebih dahulu muncul dan mempunyai ciri tersendiri: antara lain pesantren tidak menganut sistem klasikal (tidak menggunakan kelas) karena dari itu santri tinggal dalam asrama (pondok) dan pengajarannya pun dilakukan secara penuh 24 jam. Maka dari itu dengan proses pengajarannya secara penuh tersebut terjadi suatu proses interaksi antara komponen-komponen serta elemen-elemen dalam suatu sistem yang saling terkait. Sehingga membentuk satu karakter yang disebut santri yang mempunyai kepekaan tinggi mengenai masalah agama Islam. Pengasuh pondok pesantren tidak perlu mengatur santri, akan tetapi mengasuh dan memberikan bimbingan kepada para santri, dan tentunya yang paling penting

dari pengasuh pondok adalah sosok yang menjadi teladan (Mujamil Qomar dalam Achmad Patoni 2019:68). Elemen-elemen pesantren menurut Dhofier (2015: 79-89) diantaranya sebagai berikut:

1. Pondok

Suatu pondok pesantren biasanya memiliki asrama tradisional dimana siswanya tinggal bersama serta belajar dibawah bimbingan seorang atau lebih guru yang dikenal dengan sebutan “kyai”.

2. Mesjid

Mesjid merupakan suatu elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren dan dianggap tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam hal praktik sembahyang lima waktu, khutbah dan sembahyang Jum'ah, serta pengajaran kitab-kitab Islam klasik.

3. Pengajaran Kitab Islam Klasik

Pada masa lalu, pengajaran kitab Islam klasik merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Hal tersebut memiliki tujuan utama yakni untuk mendidik calon-calon ulama.

4. Santri

Santri merupakan orang yang menuntut ilmu dan bertempat tinggal di pondok. Menurut tradisi pesantren, santri terdiri dari dua yaitu:

- a. Santri mukin, ialah murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh kemudian menetap dalam kelompok pesantren.

- b. Santri kalong, ialah murid-murid yang tinggal disekitar pesantren, biasanya mereka tidak tinggal menetap dipesantren. Maka untuk mengikuti pelajaran dipesantren mereka pulang pergi dari rumah.

Sejak berdirinya pesantren hingga saat ini menurut Abdullah Syukri Zarkasyi dalam Syafe'i (2017:93) pesantren dikategorikan menjadi 3 macam bentuk, diantaranya: *Pertama*, pesantren tradisional yang masih tetap mempertahankan tradisi-tradisi lama, pembelajaran kitab, hingga mengenai tidur, makan dan MCK-nya serta kitab-kitab *maraji'* -nya yang biasa disebut kibat kuning. *Kedua*, pesantren semi modern, yakni pesantren yang memadukan pesantren tradisional dengan pesantren modern. Mengenai sistem pelajarannya pun disamping kurikulum pesantren tradisional dalam kajian kitab klasik juga menggunakan kurikulum Kemenag dan Kemendiknas. *Ketiga*, pesantren modern atau *ma'had 'aly* yakni kurikulum sistem dalam pembelajarannya tersusun secara modern demikian juga menejemennya, kemudian didukung pula dengan IT yang modern dan lembaga bahasa asing yang memadai. Menurut Zamakhsyari Dhofier pesantren diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil, kyai yang merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan di lingkungan pesantren.

2.1.2 Kepemimpinan

Pemimpin (*leader*) merupakan seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan *personality* atau *authority* (berwibawa). Pemimpin disegani dan berwibawa terhadap bawahan atau pengikutnya karena

kecakapan dan kemampuan serta didukung perilakunya yang baik. Pemimpin dapat memimpin organisasi formal maupun informal, dan menjadi panutan bagi bawahan atau pengikutnya (Feska Ajefri 2017:103).

Kepemimpinan adalah terjemahan dari bahasa Inggris *Leadership* yang berasal dari kata *leader*. Literatur tentang kepemimpinan jumlahnya sangat banyak dan definisi kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan itu sendiri. Menurut Don Hellreigel (1989:465) dalam Feska Ajefri (2017:102) kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi, dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2.1.3 Karisma

Sebelum menjelaskan karisma, menurut weber dalam kajian filsafat Fahrudin adanya tipe-tipe Tindakan sosial yang menjadikan adanya karisma, diantaranya sebagai berikut:

1. Tindakan rasional instrumental, yakni suatu hal yang menjadi pikiran utama ialah mengenai tujuan dari benar dan salah dilihat dari apa yang diinginkan.

2. Tindakan rasional berorientasi nilai, yakni adanya Lembaga nilai yang diikuti atau rasional yang berdasarkan nilai.
3. Tindakan tradisional, yakni sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan.
4. Tindakan afektif, yakni dipengaruhi oleh perasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karisma diartikan sebagai keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kepemimpinan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan, serta rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya atau atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu.

Karisma secara umum mengandung pengertian kualitas yang menandai seseorang mempunyai kemampuan luar biasa untuk melindungi orang banyak. Karisma berasal dari Bahasa Yunani yang berarti 'anugerah Ilahi'. Bangsa Arab mengartikan karisma sebagai *qudrah khariqah 'ala ijtirakh al-mujizat* (kemampuan luar biasa karena dikaruniai mukjizat). Max Weber mengartikan karisma sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dimiliki seseorang dan karisma digunakan sebagai sebutan terhadap kualitas kepribadian seseorang yang lain dari orang-orang biasa, serta diperoleh sebagai anugerah Tuhan berupa kemampuan yang luar biasa, sehingga orang tersebut menjadi teladan dan pemimpin (Zaini Muchtarom, 2000:17).

Menurut Thomas F.O (1987:43) dalam Ansori (2017:8) karisma diartikan sebagai atribut yang melekat pada diri seseorang. Karisma dapat bersumber dari keturunan atau ciri fisik, kepribadian mulia, serta kelebihan

khusus dalam pengetahuan keagamaan maupun pengetahuan umum yang dimiliki seseorang.

Menurut Fahrudin dalam ngaji filsafat menjelaskan bahwa karisma merupakan seseorang yang dianggap memiliki daya tertentu, dan kemampuan daya dipercaya pengikutnya serta tunduk padanya. Kemudian orang yang tunduk tersebut tanpa harus dipaksa oleh aturan, kekerasan, tetapi mereka tunduk karena karisma yang dimiliki orang tersebut. Karisma bersumber dari *personal meaning* yakni pemaknaan diri secara personal yang terdiri dari:

1. Konsep diri
2. Warisan
3. Altruisme
4. Budaya dan tradisi
5. Orientasi sosial atau politik
6. Spiritualitas dan agama
7. Kesenangan atau pencarian personal
8. Nilai atau ideal

Maka dari itu karisma merupakan suatu daya tarik seseorang yang memiliki kelebihan serta bakat tertentu yang memancar dari hati yang bersih dan suci sehingga sulit dijelaskan secara definisi. Akan tetapi, karisma itu dapat diketahui melalui kualitas kepribadiannya. Sehingga karisma bisa dibangun, dipupuk dengan perbuatan baik yang terus-menerus dan menumbuhkan sesuatu yang berguna untuk orang lain dan melakukannya dengan kesungguhan hati.

Kemudian dari karisma yang dimiliki pemimpin lahirlah *relational power*. Dimana seorang pemimpin karismatik memiliki kekuatan yang membuat pengikutnya diantaranya merasa:

1. Kagum
2. Percaya
3. Setia
4. Menerima tanpa bertanya
5. Mengidentifikasi diri
6. Sayang

2.1.4 Politik

Pemahaman orang Yunani Kuno mengenai pengertian “politik” bahwa perkataan politik sebagai suatu istilah yang berasal dari bahasa mereka itu diartikannya sebagai “polis” atau sebagai “negara kota”. Kemudian dalam konteks Aristoteles (384-322 SM) yang untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah politik dengan melalui pematangannya mengenai manusia yang pada dasarnya ialah binatang politik. Maka dari itu Aristoteles, menjelaskan bahwa hakikatnya politik itu berada didalam kehidupan sosial yang sesungguhnya yaitu merupakan politik dengan melalui interaksi sosial sebagai proses yang berlangsung antara satu dengan yang lain atau interaksi dari satu atau dua orang dan lebih ini sudah dianggap akan melibatkan hubungan politik (Sitepu, 2012:3).

Secara bahasa, kata *politik* merupakan hasil serapan dari bahasa Inggris yakni *politic* yang artinya mengatur. Kemudian dalam bahasa Arab

diistilahkan *siyasah* yang berasal dari kata *sasa-yasusu-siasatan*, yang artinya “*mengurus*”. Sehingga pada perkembangannya, sejarah mengguankan kata *siyasah* dan kata lain yang maknanya berkaitan dengan kata tersebut digunakan untuk pengaturan masalah kenegaraan dan pemerintahan serta hal-hal yang berkaitan dengannya (Mufti, 2015:19).

Politik adalah aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat (Deliar Noer dalam Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa). Menurut Kartono (2009:64) politik diartikan sebagai aktivitas, perilaku atau proses dengan menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan yang sah berlaku ditengah masyarakat. kemudian ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah ditengah medan sosial yang dipenuhi kemajemukan atau kebinekaan, perbedaan kontroversi, ketegangan dan konflik. Melihat kedua definisi ini, maka hakekat politik menunjukan perilaku atau tingkah laku manusia, baik itu berupa kegiatan, aktivitas ataupun sikap yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.

2.1.5 Tiga Otoritas Max Weber

Otoritas merupakan kemampuan seseorang untuk menggerakkan orang lain dan menuntut kepatuhan dari orang lain, baik secara sukarela ataupun tidak. Menurut Max Weber. TR. A. M Henoterson and Talcoot Persons pada

bukunya *The Of Social and Economic Organisation* (1974:328) dalam Arifuddin Siraj (2018:22-23) Tiga otoritas terdiri dari :

1. Otoritas Tradisional

Otoritas tradisional adalah bentuk kekuasaan yang banyak dipraktikkan para Patriark, Lord, atau Raja. Otoritas jenis ini didasarkan karena ada kepercayaan pada suatu tradisi yang sudah turun-temurun.

2. Otoritas Legal-Rasional

Otoritas Legal-Rasional diasosiasikan dengan organisasi yang bersifat birokratik dan diperoleh berdasarkan pada peraturan yang secara resmi diakui atau berlaku dimasyarakat, ini merupakan bentuk otoritas yang menjadi ciri negara modern. Pemerintah memegang tampuk pemerintahan karena mereka dibentuk dan dipilih menurut hukum yang ada. Kemudian sumber pada otoritas legal-rasional adalah legalitas atau suatu system yang secara sadar diciptakan yaitu aturan-aturan yang rasional. Dan yang berkuasa sesungguhnya *rule of law*, bukan personal seperti di otoritas tradisional maupun otoritas kharisma.

3. Otoritas Kharismatik

Otoritas kharismatik merupakan antithesis dari otoritas tradisional dan legal-rasional dan semata-mata didasari oleh kharisma. Otoritas kharismatik diperoleh dari kualitas kepribadian seseorang yang lain dari orang-orang biasa dan diperoleh sebagai anugerah Tuhan berupa

kemampuan yang luar biasa, sehingga orang tersebut menjadi teladan dan pemimpin. Otoritas kharismatik sebagai fenomena sosial yang biasanya muncul dalam situasi krisis. Oleh karena itu dipandang sebagai juru selamat yang pada dirinya terdapat kekuatan yang luar biasa dan daya tarik magnetik yang kuat. Meskipun kharisma pada dasarnya tidak dapat ditiru, tetapi Weber berpendapat bahwa kharisma dapat dibagi menjadi dua macam: *Pertama*, kharisma yang terdapat pada diri seseorang semata-mata karena anugerah Tuhan. Pada kharisma ini murni dan layak disebut sebagai kharisma yang sebenarnya dan tidak dapat diperoleh melalui cara apapun. *Kedua*, kharisma buatan (*artificial charisma*) yang bisa dibentuk melalui usaha luar biasa yang ditempuh melalui usaha luar biasa yang ditempuh melalui jalan hidup bertapa atau pengalaman mistis religious lainnya (Zaini Muchtarom 2000:18). Kekuasaan pemimpin kharismatik dalam memerintah orang lain tidak berasal dari jabatan resmi, baik itu diperoleh lewat pemilu ataupun pewarisan. Mereka dipatuhi bukan karena tradisi atau status organisasi. Mereka mampu menguasai orang lain karena para pengikutnya mempercayainya.

2.1.6 Kekuasaan

Kekuasaan (*power*) seringkali diartikan sebagai pengaruh (*influence*) atau otoritas (*authority*). Seseorang yang memiliki kekuasaan dikatakan sebagai seseorang yang berpengaruh atau seseorang yang memiliki otoritas

atau wewenang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan dalam pandangan Michael Foucault adalah kekuasaan yang teraktualisasi dalam pengetahuan, dengan begitu pengetahuan dikontrol oleh kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Dengan demikian hubungan antara kekuasaan dengan pengetahuan menimbulkan adanya hegemoni.

Pandangan lainnya mengenai kekuasaan ialah dari Steven Lukes yang merupakan ahli teori sosial dan politik Inggris, dan saat ini ia merupakan professor politik dan sosiologi di Universitas New York. Steven Lukes menjelaskan dimensi ketiga kekuasaan atau tiga wajah kekuasaan, sebuah konsep yang pertama kali ia ciptakan dalam bukunya pada tahun 1974, yakni *Power: A Radical View*. Lukes menyatakan bahwa jika berpikir mengenai kekuatan dalam cara sempit atau satu dimensi, kemudian dapat memperluas pandangan menjadi dua dimensi. Akan tetapi Lukes berpandangan bahwa kekuatan yang paling baik dilihat dalam tiga dimensi, dan sudut pandang tentang penggunaan kosakata dimensi adalah untuk menyampaikan bahwa jika dapat melihatnya dalam tiga dimensi akan melihat lebih jauh dan lebih dalam ke dalam fenomena. Lukes menguraikan bagaimana dimensi ketiga kekuasaan berbeda dari dimensi pertama kekuasaan (Robert Dahl), dimensi kedua kekuasaan (Peter Bachrach dan Morton S. Baratz). Dengan demikian penjelasan singkat dalam ciri khas dari ketiga pandangan kekuasaan tersebut diantaranya (2005:29), Pandangan satu dimensi kekuasaan dari Robert Dahl fokus pada:

1. Perilaku
2. Pengambilan keputusan
3. Kunci masalah
4. Konflik yang dapat diamati (terbuka)
5. Kepentingan yang subjektif, dilihat sebagai preferensi kebijakan diungkapkan oleh partisipasi politik

Kemudian pandangan dua dimensi kekuasaan dari Peter Bachrach dan Morton S. Baratz diantaranya:

1. Pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan
2. Masalah dan potensi masalah
3. Konflik yang dapat diamati (terbuka atau terselubung)
4. Kepentingan yang subjektif, dilihat sebagai preferensi kebijakan atau keluhan

Yang terakhir ciri khas dari pandangan Lukes sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan dan kontrol atas politik agenda (tidak harus melalui keputusan)
2. Masalah dan potensi masalah
3. Dapat diamati (terbuka atau terselubung), dan konflik laten
4. Kepentingan subjektif dan nyata

Lukes (2005:25) memandang kekuasaan secara radikal. Lukes mengkritik mengenai pemikiran Dahl, Bachrach dan Baratz karena dianggap terlalu fokus pada pendekatan tingkah laku. Lukes percaya bahwa kepentingan riil tidak terletak pada kekuasaan subjek, melainkan pada

tindakan objek dalam menentukan pilihan terhadap kondisi otonomi relatif khususnya dari pengaruh kekuasaan subjek pada objek melalui partisipasi demokrasi.

Kekuasaan menurut Dahl dapat diobservasi saat terjadi konflik riil dalam suatu proses pengambilan keputusan. Menitik beratkan pada studi tingkah laku para aktor dalam pembuatan keputusan atas isu kunci yang penting, kontroversial dan konflik aktual (Dahl, 1957:204). Konflik yang dimaksud Dahl (1957:204) merupakan konflik antar preferensi yang diasumsikan dengan sadar oleh aktor yang terlibat, tampak pada suatu tindakan sehingga dapat diamati tingkah laku aktor tersebut. Kepentingan dipahami sebagai preferensi kebijakan yang dapat diamati atas kepentingan subjektif. Hal ini dalam pandangan Dahl memperlihatkan pengambilan keputusan hanya terlihat pada situasi yang nyata. Pengambilan keputusan hanya terpusat pada satu pihak yang mampu mendominasinya dan pihak lain terdominasi. Dan menurut Dahl dominasi suatu hal yang menjadi kunci dari proses pengambilan keputusan.

Kemudian hal ini dikritik oleh Bachrach dan Baratz (2000:948) memaparkan alternatif pilihan tindakan *non decision making* yaitu keinginan perubahan dalam masyarakat ditekan sebelum disuarakan, diupayakan tetap tertutup dan dilenyapkan sebelum mencapai arena pembuatan keputusan yang relevan. Sehingga membuat objek tidak dapat melakukan konfrontasi melalui cara sistemis karena telah terjadi bias mobilisasi oleh kepentingan penguasa. Secara ringkas menurut Bachrach dan Baratz (2000:948) memperlihatkan

bahwa telah terjadi diskusi-diskusi sebelum terjadinya proses pengambilan keputusan. Kepentingan yang telah direncanakan tersebut seolah-olah bukan menjadi kepentingan penguasa karena telah diatur sedemikian rupa sebelum proses pengambilan keputusan berlangsung. Sehingga pada saat terjadinya proses pengambilan keputusan, hakikatnya keputusan yang telah ditentukan sementara yang sebelumnya ada berbagai macam proses hegemoni untuk mencapai tujuan.

Lukes tidak sependapat dengan kubu pluralis karena terlalu menekankan konflik aktual. Menurutnya konflik laten juga dapat berlaku dalam sebuah kekuasaan yaitu konflik yang terjadi saat tidak ada kesesuaian antara kepentingan penguasa dengan kepentingan riil, sehingga objek tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Menurut Lukes (2005:37) kekuasaan merupakan "*A exercises power over B when affects b contrary to B's interest*". Artinya, A menekankan kekuasaan atas B ketika A mempengaruhi B bertentangan dengan kepentingan B. Hal ini menekankan adanya kemampuan subjek untuk mempengaruhi tindakan objek meskipun bertentangan dengan kepentingan objek karena memiliki kepentingan lain. Secara ringkas Lukes (2005:25) memperlihatkan kenyataan bahwa dua pihak yang sedang berdialog memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan yang berbeda ini kemudian dipertemukan saat proses pengambilan keputusan, sehingga akan muncul proses negosiasi antar pihak-pihak yang berkepentingan. Dari proses negosiasi tersebut yang akan diperoleh adanya suatu tujuan alternatif

yang telah disepakati oleh berbagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses kekuasaan.

Lukes juga memformulasikan kekuasaan merujuk pada tingkah laku yang beraturan, yang dapat mempengaruhi tingkah laku lainnya. Lukes mengkritik pandangan kubu pluralis yang terlalu berlebihan mengenai arti penting konflik aktual, menurutnya kekuasaan dapat digunakan dalam situasi konflik potensial dan laten yang tidak akan menjadi aktual (Lukes, 2005:28). Dengan adanya konflik laten merupakan suatu pertentangan antara kepentingan penguasa dan “real” kepentingan objek yang tidak dilibatkan dalam setiap proses pembuatan keputusan. Konsep kepentingan yang merupakan berbagai hal-hal yang sangat penting dalam upaya untuk membedakan efek signifikan dan non signifikan dari pelaksanaan kekuasaan oleh A atas B.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini untuk menjadi bahan referensi serta acuan dalam memperoleh penulisan yang lebih baik. Berikut penelitian terdahulu disajikan dalam tabel matriks sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nur Aqifah (2020). Pesantren dan Politik : Peran	Metode yang digunakan adalah kualitatif. Dengan	Pengaruh pesantren terhadap pilihan politik santri, umat dan	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada fokus

	dan Pengaruh dalam Pilpres 2019 di Kota Makasar	menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber literatur, jurnal, dokumen, dan artikel.	masyarakat pada pilpres 2019 di Kota Makasar tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Karena elit pesantren dalam hal tersebut kyai pimpinan tidak mampu mengintervensi pilihan politik para santri, umat dan masyarakat dikarenakan beberapa hal yakni adanya loyalitas terhadap lembaga Nahdli Ulama, dengan kecenderungan politik terhadap salahsatu pasangan calon kandidat, kuatnya doktrin keluarga dibandingkan dengan doktrin pesantren (elit).	penelitian serta lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini berada di Kota Makasar, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan di Kota Tasikmalaya.
2.	Samsul Ma'arif. (2015). Pengaruh	Dalam menganalisis	Dari hasil penelitian ini,	Perbedaan pada penelitian ini

	<p>Kepemimpinan Kharismatik Kyai (H. Hasananin Yahya) terhadap Loyalitas Ustadz di Pondok Pesantren Jagasatru Kota Cirebon</p>	<p>data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut : (1) teknik pengumpulan data. Adapun teknik-tekniknya adalah : a. Observasi, b. Wawancara, c. Penyebaran angket. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi pearson product moment (PPM).</p>	<p>dapat disimpulkan bahwa : hasil perhitungan koefisien korelasi dengan nilai 0,281. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pengaruh kepemimpinan kyai terhadap pembentukan loyalitas ustadz di Pondok Pesantren Jagasatru Kota Cirebon, variabel x 93,5%, variabel y 96,5%, rxy 0,281, kd 7,89.</p>	<p>terdapat pada fokus penelitian, objek penelitian, serta lokasi penelitian.</p>
3.	<p>Muhamad Ikbal (2020). Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis (Studi Kasus Kiai Aceng Malki di Pesantren Hidayatul</p>	<p>Metode yang digunakan adalah kualitatif. Metode pengumpulan data adalah dengan wawancara, dokumentasi,</p>	<p>Adanya peran ganda yang dilakukan Kiai Aceng Malki di Pondok Pesantren Hidayatul Faizien. Selain sebagai pengasuh dan juga pengajar dari para</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada fokus penelitian, objek penelitian, serta lokasi</p>

	Faizien Kabupaten Garut)	observasi dan juga studi pustaka. Adapun jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah triangulasi data.	santri, beliau terlibat dalam politik praktis. Wujud dari adanya keterlibatan dalam politik praktis yaitu masuk dalam salahsatu partia politik yaitu PKB yang juga pernah menjabat dalam struktur kepengurusan partai yang strategis, ikut serta dalam pemilu tahun 2019 sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XIV.	penelitian yang berbeda.
4.	Mahatva Yoga Adi Pradana (2021). Relasi Kuasa Politik Tokoh Agama dalam Hegemoni Pemilukada 2020	Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Serta sumber data yang berasal dari wawancara dan survey.	Pemilukada Kabupaten Malang 2020 memberikan peluang untuk para tokoh agama atau ulama untuk maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Hal itu berdasarkan	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada fokus penelitian, objek penelitian, serta lokasi penelitian.

			mekanisme dukungan partai politik. Dalam membangun relasi kekuasaannya tokoh agama menjadikan kekuatan personal sebagai modal awal terjun di dalam politik. Tokoh agama di Kabupaten Malang juga membangun jaringan pada organisasi politik serta keagamaan	
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kehadiran pesantren di Indonesia sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan mewarnai pula sejarah perkembangan pendidikan serta penyebaran agama Islam di Indonesia. Pesantren dipimpin oleh kyai sebagai pemimpin formal yang tentunya memiliki karisma bagi pengikutnya. Karisma yang dimiliki kyai tentunya memberikan pengaruh terhadap pengikutnya, baik kehidupan sosial ataupun politik. Dengan demikian keberadaan pesantren pun memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai bidang, salah satunya politik. Sehingga hubungan pesantren dengan politik sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi dan terjadi dalam bentuk hubungan yang berbeda-beda, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian menjadi

perdebatan terkait hubungannya pesantren dalam politik, dua perbedaan yang saling bertolak belakang. Pendapat yang mengabsahkan dan pendapat yang menolak karena hal pengingkaran terhadap peran pesantren sebagai lembaga pendidikan.

Ada cukup banyak penelitian dan kajian dengan pesantren yang dijadikan sebagai objek kajiannya. Karena hal tersebut bisa ditunjukkan bahwa pesantren merupakan khazanah yang kaya akan keragaman perspektif. Sehingga merupakan suatu hal yang wajar jika peneliti demi peneliti dilakukan, akan tetapi selalu saja terdapat perspektif yang dapat diteliti lebih lanjut. Seperti dalam penelitian ini dengan judul *Tumut* Sebagai Wujud Karisma Kyai Di Pesantren Miftahul Yaqinil Huda Kota Tasikmalaya.

Pesantren Miftahul Yaqinil Huda ini berinduk pada Pesantren Miftahul Huda Manonjaya yang tersohor dan memiliki sejarah panjang dalam politik, serta memiliki hubungan dalam politik. Hal tersebut setidaknya memberikan pengaruh terhadap Pesantren Miftahul Yaqinil Huda. Kemudian mengenai pilihan politik yang terjadi berasal dari keputusan guru dari Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, hal tersebut terjadi karena adanya relasi kuasa. Relasi ini terjadi antara pemimpin Pesantren Miftahul Yaqinil Huda terhadap Pesantren Miftahul Huda Manonjaya. Kekuasaan yang dimiliki Pesantren Miftahul Huda Manonjaya tentunya mampu memberikan pengaruh kepada pesantren yang berinduk dengannya, yakni terkait pilihan politik. Lalu bagaimana relasi kuasa antara kyai, santri dan alumni santri yang terjadi di Pesantren Miftahul Yaqinil Huda. Maka dari itu *tumut* sebagai Wujud Karisma Kyai di Pesantren Miftahul Yaqinil Huda Kota Tasikmalaya.

Pada tinjauan pustaka, peneliti membahas mengenai teori pesantren, politik, kekuasaan dan tiga otoritas dari Max Weber. Kemudian beberapa teori yang lainnya diharapkan mampu menjadi referensi dalam rangka melakukan penelitian ini. Serta pengertian-pengertian yang ada di tinjauan pustaka diharapkan mampu menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penelitian ini.

Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan behaviorisme. Hal ini bertujuan agar dapat menemukan makna, menyelidiki, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari informan. Hasil dari penelitian ini mengetahui bagaimana *tumut* sebagai wujud karisma kyai yang terjadi di Pesantren Miftahul Yaqinil Huda Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.2
Kerangka Pemikiran

